

Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

Ivan Hari Putra¹; Slamet Usman Ismanto²; Nunung Runiawati³

Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences

¹ivan17008@Mail.Unpad.Ac.Id ; ²slamet.Ismanto@Unpad.Ac.Id; ³n.Runyawati@Unpad.Ac.Id

ABSTRACT

AN INFORMATION SYSTEM CALLED SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) IS A LOCAL ASSET MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USED TO ACHIEVE HIGH QUALITY LOCAL GOVERNMENT FINANCES MANAGEMENT. BUT IN REALITY, THE USE OF SIMDA BMD IN BANDUNG CITY GOVERNMENT DOESN'T REALLY AFFECT THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCES MANAGEMENT. THE PURPOSE OF THIS RESEARCH IS TO DESCRIBE THE EFFECTIVENESS OF SIMDA BMD IN BANDUNG CITY GOVERNMENT. THE METHOD USED IN THIS RESEARCH IS QUALITATIVE RESEARCH, WHERE THIS RESEARCH IS FOCUSED ON THE ASPECTS THAT DESCRIBE THE EFFECTIVENESS OF SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) IN THE BANDUNG CITY GOVERNMENT. THE GUIDANCE THEORY OF THIS RESEARCH IS THE THEORY OF EFFECTIVENESS OF INFORMATION SYSTEM PROPOSED BY DELONE AND MCLEAN (2003) WHICH CONSISTS OF 6 (SIX) DIMENSIONS, INFORMATION QUALITY, SYSTEM QUALITY, SERVICE QUALITY, INTENTION TO USE, USER SATISFACTION, AND NET BENEFITS. THE RESULT OF THIS RESEARCH DOESN'T SHOW THAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) IN BANDUNG CITY GOVERNMENT IS EFFECTIVE. BASED ON THE RESULT, THE INFORMATION QUALITY AND SYSTEM QUALITY OF SIMDA BMD ISN'T GOOD ENOUGH TO SUPPORT USER'S WORKS. ALSO, USERS ARE NOT SATISFIED WITH THE SYSTEM ITSELF WHILE THE SYSTEM ALSO HAVEN'T ACHIEVED ITS OUTCOME YET. THE SUPPORTING HARDWARES AND SOFTWARES, OTHER INFORMATION SYSTEM THAT HAS BETTER QUALITY ACCORDING TO USERS, AND THE MANDATORY USE OF THE SYSTEM FOR ALL ASSET MANAGEMENT-RELATED WORKS ARE THE FACTORS THAT AFFECT THE EFFECTIVENESS OF SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD).

KEYWORDS: EFEKTIVITAS, SISTEM INFORMASI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD), BARANG MILIK DAERAH (BMD), DELONE DAN MCLEAN

THE EFFECTIVENESS OF SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) IN BANDUNG CITY GOVERNMENT

ABSTRAK

PEMERINTAH INDONESIA MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI BERUPA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) UNTUK DIGUNAKAN PADA PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN ASET DALAM MENCAPAI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK. NAMUN PADA PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG, SIMDA BMD BELUM MAMPU MEMBERIKAN HASIL PADA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK. OLEH KARENA ITU, TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA EFEKTIVITAS DARI SIMDA BMD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH METODE PENELITIAN KUALITATIF YANG BERTUJUAN UNTUK MENGGAMBARAKAN ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG. TEORI YANG DIKEMUKAKAN OLEH DELONE DAN MCLEAN (2003) MENJADI ACUAN DALAM PENELITIAN INI, DIMANA DALAM MENGGAMBARAKAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DAPAT DILIHAT DARI 6 (ENAM) DIMENSI, YAITU KUALITAS INFORMASI, KUALITAS SISTEM, KUALITAS PELAYANAN, MAKSUD PENGGUNAAN, KEPUASAN PENGGUNA, DAN MANFAAT BERSIH. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) BELUM EFEKTIF DIGUNAKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG. HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN KUALITAS INFORMASI DAN KUALITAS SISTEM YANG KURANG BAIK DAN PENGGUNA YANG MERASA TIDAK PUAS DALAM MENGGUNAKAN SIMDA BMD SERTA BELUM TERCAPAINYA *OUTCOME* DARI SIMDA BMD INI SENDIRI. ADAPUN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EFEKTIVITAS SIMDA BMD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG ADALAH PERANGKAT PENDUKUNG DARI SIMDA BMD, ADANYA SISTEM INFORMASI LAIN YANG DIANGGAP LEBIH BAIK OLEH PENGGUNA, SERTA KEWAJIBAN DALAM PENGGUNAANNYA.

KATA KUNCI: EFFECTIVENESS, INFORMATION SYSTEM, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD), LOCAL GOVERNMENT ASSET, DELONE AND MCLEAN

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia sedang melakukan pembenahan-pembenahan sistem pemerintahan yang kurang baik, dengan tujuan agar sistem pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pembenahan sistem pemerintahan ini, maka lahirlah inisiatif reformasi di Indonesia. Reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. Salah satu bentuk pembenahan tata kelola pemerintahan pada awal era Reformasi adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai tata kelola keuangan negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Setelah disahkannya Undang-Undang mengenai tata kelola keuangan negara, pengelolaan keuangan negara mulai berpegang pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Adapun asas-asas yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proposionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas ini membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya untuk mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang mendukung dalam pencapaian *good governance* di Indonesia.

Salah satu cara untuk mewujudkan penerapan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang baik serta mencapai *good governance* dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui penerapan sistem informasi. Dalam Ilmu Administrasi Publik, sistem informasi merupakan komponen yang sangat penting. Sistem informasi berperan sebagai sumber daya yang penting bagi

organisasi publik dalam menyajikan informasi yang dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi publik serta meningkatkan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menerapkan sistem informasi dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA diharapkan memberikan banyak pengaruh terhadap organisasi, proses bisnis dan transaksinya agar berjalan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengembangan SIMDA mengharapkan outcome berupa keuangan daerah yang akuntabel yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa yang berwenang dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SIMDA BMD atau Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) merupakan salah satu jenis SIMDA yang paling banyak digunakan di pemerintah daerah. Salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan SIMDA BMD adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penggunaan SIMDA BMD oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak lain bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah. Namun, pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri masih memiliki banyak permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya, sehingga Pemerintah Daerah Kota Bandung baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa yang berwenang pada tahun 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 34A/LHP/XVII.BDG/06/2020 dipaparkan bahwa terdapat permasalahan penatausahaan aset tetap dalam pengelolaan aset di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Analis Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung diperoleh keterangan bahwa Sistem Informasi

Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) masih memiliki kekurangan dalam hal informasi yang dihasilkan maupun informasi yang terdapat dalam sistem informasi tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti membahas lebih lanjut mengenai efektivitas dari SIMDA BMD yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia, terutama pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan melihat model efektivitas sistem informasi manajemen dari DeLone dan McLean (2003), yang terdiri atas 6 (enam) dimensi, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, maksud penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Keenam dimensi dari DeLone dan McLean (2003) ini memiliki hubungan sekuensial yang terbentuk menjadi model efektivitas. Adapun dimensi kualitas informasi dapat menilai kualitas dari informasi yang terdapat maupun yang dihasilkan oleh sistem informasi, sedangkan kualitas sistem menilai kualitas dari sistem yang berjalan pada sistem informasi itu sendiri. Dimensi kualitas pelayanan melihat bagaimana organisasi pengembang dari sistem informasi mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna sistem informasi. Dimensi maksud penggunaan menilai sejauh mana sistem informasi digunakan oleh pengguna, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Selain itu, dimensi kepuasan pengguna lebih menilai pada kepuasan yang dirasakan oleh pengguna dari keseluruhan sistem pada sistem informasi. Adapun dimensi manfaat bersih menilai sejauh mana sistem informasi mampu memberikan dampak bagi pengguna dan memberikan *output* serta *outcome* yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

METODE

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung” ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mencari serta memahami makna suatu fenomena berdasarkan pandangan dari individu partisipan (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi.

Adapun desain penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah studi kasus, dimana penelitian ini berfokus pada satu hal, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Menurut Creswell & Creswell (2018) studi kasus adalah desain yang ditemukan pada banyak bidang, terutama evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam dari sebuah kasus, biasanya program, kejadian, aktivitas, proses, atau individu-individu. Studi kasus dalam penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) subjek penelitian yaitu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) serta Dinas Pendidikan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung selaku pengguna Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam penelitian ini dibutuhkan data mengenai persepsi pengguna SIMDA BMD yang berguna untuk mengetahui efektivitas dari aplikasi SIMDA BMD itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua bagian data yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung melalui wawancara terstruktur kepada informan. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui literatur seperti artikel dalam jurnal serta sumber data lain seperti laporan-laporan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Sedangkan, untuk pengumpulan data tersebut dilakukan studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Informan Penelitian

No.	N	Kode	Posisi
	Informan	Informan	Informan
1.	Infor man 1		Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan BPKA Kota Bandung
2.	Infor man 2		Analisis Aset Daerah BPKA Kota Bandung
3.	Infor man 3		Operator Komputer

		Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset BPKA Kota Bandung
4.	Infor man 4	Operator Komputer Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset BPKA Kota Bandung
5.	Infor man 5	Pengurus Barang Bapenda Kota Bandung
6.	Infor man 6	Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kota Bandung

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data menurut Miles, Huberman & Saldana (2014). Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014) dalam menganalisis data maka hal pertama yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumen, dan artefak. Kemudian, dilakukan reduksi data dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, menyusun abstraksi, dan/atau mengubah data yang merupakan hasil dari pengumpulan data seperti transkrip, dokumen, dan sebagainya. Setelah itu, dilakukan penyajian data dengan menyusun informasi yang teratur agar memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan setelah pengumpulan data selesai dan analisis data sebelumnya dilakukan.

Agar penelitian lebih akurat, maka penelitian ini dilakukan triangulasi data. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Selanjutnya, dilakukan perbandingan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Kemudian dilakukan juga dengan membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Selain itu, dilakukan juga perbandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan

pandangan orang. Terakhir, dilakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Untuk menggambarkan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang diprakarsai oleh DeLone dan McLean pada tahun 2003 dalam publikasinya berupa artikel jurnal yang berjudul *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. Dalam publikasinya tersebut, DeLone dan McLean membahas mengenai dimensi-dimensi apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas dari sebuah sistem informasi yang digunakan didalam organisasi. Dimensi-dimensi yang diajukan oleh DeLone dan McLean dalam publikasinya tersebut terdiri atas 6 (enam) dimensi yang membentuk sebuah model hubungan. Dimensi-dimensi tersebut adalah *Information Quality* (Kualitas Informasi); *System Quality* (Kualitas Sistem); *Service Quality* (Kualitas Pelayanan); *Intention to Use* (Maksud Penggunaan); *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna); *Net Benefits* (Manfaat Bersih).

Kualitas Informasi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dalam menilai kualitas informasi dari sebuah sistem informasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah akurasi informasi, format *output* informasi, keandalan informasi, keterkinian informasi, dan kelengkapan informasi. Aspek-aspek tersebut dianggap mampu menggambarkan kualitas dari informasi yang terdapat pada sistem informasi maupun yang dihasilkan oleh sistem informasi. Dalam menilai kualitas informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pun dilihat berdasarkan aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, aspek pertama yaitu akurasi

informasi masih belum menunjukkan hasil yang baik. Dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi yang dilakukan penulis, maka didapati hasil bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat dari keakuratan informasi yang baik. Keakuratan informasi yang baik dapat dilihat berdasarkan seberapa tinggi keakuratan informasi yang dihasilkan dan seberapa konsisten informasi yang dihasilkan. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) sendiri belum mampu memberikan tingkat keakuratan informasi yang tinggi, seperti perbedaan data yang tersaji pada laporan dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, SIMDA BMD juga belum memiliki konsistensi dalam menghasilkan informasi, dimana masih adanya ketidaksesuaian informasi yang di-input oleh pengguna dengan laporan yang dihasilkan oleh SIMDA BMD.

Untuk aspek kedua dalam menilai kualitas informasi adalah format *output* informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah mengakomodir format dari peraturan terbaru mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kodifikasi serta penggolongannya, namun SIMDA BMD belum mampu memenuhi aspek lainnya dalam format laporan yang dihasilkan. SIMDA BMD belum mampu memberikan format laporan yang mudah dibaca dan dipahami oleh penggunanya. Selain itu, format laporan yang dihasilkan oleh SIMDA BMD juga menyulitkan pengguna dalam melakukan pengolahan data karena terdapat format otomatis dan format nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Padahal, dalam terciptanya format *output* informasi yang baik maka dibutuhkan format laporan yang mudah dibaca, mudah dipahami, mudah untuk diolah, dan berguna bagi pengguna.

Aspek ketiga dalam menilai kualitas informasi adalah keandalan informasi dari sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah memiliki keandalan yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan SIMDA BMD telah memenuhi aspek-aspek terciptanya keandalan informasi pada sebuah sistem informasi. Informasi yang terdapat pada SIMDA BMD dijamin keamanannya karena terdapat pada server

khusus yang membutuhkan akses khusus untuk mengaksesnya. Selain itu, SIMDA BMD mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena informasi yang terdapat dalam SIMDA BMD di-input oleh pengguna yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Terakhir, SIMDA BMD informasinya dapat dipertanggungjawabkan karena pengguna SIMDA BMD, yaitu orang-orang yang melakukan pengelolaan BMD, telah diatur dalam peraturan yang telah jelas tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan BMD.

Keterkinian informasi merupakan aspek keempat dalam menilai kualitas informasi dari sistem informasi. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis, dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum memiliki keterkinian informasi yang baik. Hal ini didasari pada belum terpenuhinya aspek keterkinian informasi dari sebuah sistem informasi. SIMDA BMD sendiri masih mendapati permasalahan informasi yang sudah dihapuskan seringkali gagal dan muncul kembali sehingga data yang terdapat pada informasi tersebut sudah usang. Selain itu, pemrosesan informasi yang memakan waktu lama juga mengurangi keterkinian dari SIMDA BMD karena informasi yang seharusnya dilaporkan pada hari tertentu baru dapat dilaporkan di hari lainnya akibat menunggu sistem yang cukup lama dalam memproses informasi.

Aspek kelima dalam menilai kualitas informasi adalah kelengkapan informasi dari sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) sudah mengakomodir untuk melakukan input informasi yang cukup lengkap dalam mendukung penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Namun demikian, SIMDA BMD masih memiliki permasalahan pada penyajian hasil pelaporan yang terkadang memuat informasi yang tidak lengkap. Selain itu, tidak mumpuninya SIMDA BMD dalam memproses informasi yang sangat banyak juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Apabila merujuk pada aspek-aspek kelengkapan informasi maka dapat dikatakan kelengkapan informasi pada SIMDA BMD ini belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna

terutama informasi yang berkaitan dengan pelaporan.

Kualitas Sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dalam menilai kualitas sistem dari sebuah sistem informasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah kemudahan penggunaan, ketersediaan, keandalan sistem, fleksibilitas sistem, dan keinteraktifan sistem. Aspek-aspek tersebut dianggap mampu menggambarkan kualitas sistem dari sistem informasi itu sendiri. Dalam menilai kualitas sistem Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pun dilihat berdasarkan aspek-aspek tersebut.

Aspek pertama dalam menilai kualitas sistem sebuah sistem informasi adalah kemudahan penggunaan dari sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dipengaruhi pada ekspektasi pada saat awal penggunaannya. Informan yang telah mengetahui sistem informasi lain dengan fungsi yang lama, merasakan kemudahan penggunaan SIMDA BMD tidak baik. Sementara itu, informan yang belum mengetahui atau belum pernah menggunakan sistem informasi lain dengan fungsi yang sama merasakan kemudahan penggunaan SIMDA BMD sudah baik. Hal tersebut dikarenakan belum terbentuknya celah antara ekspektasi dengan kenyataan serta belum terbentuknya kemampuan pengguna untuk membandingkan sistem informasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, kemudahan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum baik.

Selanjutnya, aspek kedua dari kualitas sistem informasi adalah ketersediaan sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa ketersediaan perangkat lunak maupun perangkat keras pendukung Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum memadai. Dimana, perangkat keras dan perangkat lunak pada beberapa instansi di Pemerintah Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya menunjang pengoperasian dari SIMDA BMD ini. Sehingga, aspek dalam ketersediaan sistem

informasi belum mampu terpenuhi oleh SIMDA BMD.

Selain itu, keandalan sistem dari sistem informasi juga menjadi aspek dalam menilai kualitas sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Pengguna dari SIMDA BMD tetap menggunakan serta memanfaatkan SIMDA BMD ketika dibutuhkan karena dipengaruhi penggunaannya yang bersifat wajib. Dimana seluruh data atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersimpan dalam SIMDA BMD tersebut. Namun, pengguna tidak serta merta begitu saja langsung mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa usaha terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan ketika dibutuhkan suatu informasi atau data diperlukan adanya perubahan format ke dalam aplikasi lain untuk memudahkan.

Aspek selanjutnya dalam menilai kualitas sistem dari sistem informasi adalah fleksibilitas dari sistem informasi. Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan penulis didapati bahwa pembaharuan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam mendukung kebutuhan pengguna baru dilaksanakan baru-baru ini, artinya SIMDA BMD belum mampu beradaptasi menyesuaikan pada kebutuhan penggunaannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 telah disahkan sejak tahun 2016 dan pemerintah daerah harus melaksanakan peraturan ini maksimal mulai 3 (tiga) tahun sejak peraturan tersebut disahkan. Sedangkan, SIMDA BMD baru melaksanakan pembaharuan setelah 5 (lima) tahun peraturan yang berlaku disahkan. Begitu pun dengan penggunaannya pada Pemerintah Daerah Kota Bandung yang baru dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu, sifat dari SIMDA BMD yang berupa desktop-based juga membatasi penggunaan oleh pengguna pada satu tempat dan satu perangkat saja, dimana SIMDA BMD tidak dapat diakses dimana saja pada telepon genggam pintar.

Aspek terakhir dalam menilai kualitas sistem dari sistem informasi adalah keinteraktifan sistem dari sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah memiliki keinteraktifan

yang cukup baik. Hal ini didasari atas terpenuhi aspek-aspek dalam keinteraktifan sebuah sistem informasi, di antaranya adanya integrasi antar sistem informasi dan kemungkinan dalam memberikan feedback kepada pengembang dari sistem informasi. Dimana, SIMDA BMD telah terintegrasi dengan sistem informasi lain yang digunakan oleh pengguna untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan serta adanya kemungkinan bagi pengguna untuk memberikan feedback ketika terjadi permasalahan dalam SIMDA BMD.

Kualitas Pelayanan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Indikator Pelayanan	1 Informan	2 Informan	3 Informan	4 Informan
Keandalan BPKP dalam menyelesaikan permasalahan SIMDA BMD	P	CP	P	P
Empati BPKP dalam menyelesaikan permasalahan SIMDA BMD	P	P	P	P
Responsivitas BPKP dalam menyelesaikan permasalahan SIMDA BMD	CP	CP	CP	CP
Keinteraktifan BPKP dalam menyelesaikan permasalahan SIMDA BMD	SP	P	SP	SP
Kepuasan keseluruhan atas layanan BPKP	CP	CP	P	P

Untuk melihat kualitas pelayanan dari pengembang Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) maka diperlukan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kualitas pelayanannya. Indikator-indikator tersebut adalah *Reliability* (Reliabilitas); *Empathy* (Empati); *Responsiveness* (Responsivitas); *Organizational Interactivity* (Keinteraktifan Organisasional). Dalam menggambarkan kualitas pelayanan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dilakukan wawancara terhadap Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 selaku pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung. Hal ini dikarenakan hanya BPKA Kota Bandung selaku pengelola aset yang dapat berkomunikasi langsung dengan pihak BPKP mengenai SIMDA BMD. Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan tersebut didapat hasil bahwa BPKP telah memberikan pelayanan yang cukup baik bagi pengguna dari

SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Adapun respon dari tiap informan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.
Respon Informan terhadap Kualitas Pelayanan Pengembang SIMDA BMD

Keterangan:

SP : Sangat Puas

P : Puas

CP : Cukup Puas

TP : Tidak Puas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah cukup dapat diandalkan karena pihak mereka lah yang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) tetapi masih terdapat hal yang memengaruhi pada ketidakandalan BPKP selaku pengembang Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Namun, bagaimanapun juga BPKP adalah organisasi yang mengembangkan SIMDA BMD, sehingga pengguna harus mengandalkan BPKP dalam penyelesaian permasalahan.

Sementara itu, untuk aspek kedua, yaitu empati dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah baik. Hal ini didasari pada terpenuhinya aspek berupa respon dari BPKP ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan SIMDA BMD telah baik, dimana BPKP menunjukkan keinginan untuk membantu dan bekerja sama dengan pengguna dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan SIMDA BMD.

Selanjutnya, untuk aspek ketiga dalam menggambarkan kualitas pelayanan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah responsivitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 4 (empat) informan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merespon pengguna ketika meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada SIMDA BMD. Hal ini tentu berdampak pada pekerjaan pengguna dan organisasi secara keseluruhan. Sementara itu, dimensi

responsivitas menjadi salah satu dimensi yang penting dalam menggambarkan kualitas pelayanan dari organisasi pengembang sistem informasi. Namun, dalam hal ini BPKP selaku pengembang dari SIMDA BMD belum mampu memenuhi responsivitas yang baik.

Aspek terakhir adalah keinteraktifan organisasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah memenuhi aspek-aspek dalam terciptanya keinteraktifan organisasional. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa kerja sama antar organisasi antara BPKP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung selaku pengguna dari SIMDA BMD telah terjalin dengan baik. Selain itu, adanya pendampingan terhadap pengguna dari BPKP serta alur komunikasi yang jelas menunjukkan bahwa BPKP telah mampu memenuhi aspek dalam keinteraktifan organisasional selaku dari pengembang SIMDA BMD.

Maksud Penggunaan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dimensi selanjutnya yang terdapat dalam model efektivitas sistem informasi DeLone dan McLean (2003) adalah maksud penggunaan. Maksud penggunaan menjadi dimensi yang penting dalam menggambarkan efektivitas dari sebuah sistem informasi. Hal ini dikarenakan maksud penggunaan atau penggunaan dari sebuah sistem informasi dapat berpengaruh pada realisasi dari manfaat sistem informasi tersebut (DeLone & McLean, 2016).

Aspek pertama dalam menggambarkan maksud penggunaan adalah sifat penggunaan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), termasuk pola penggunaannya di dalamnya. Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri, SIMDA BMD digunakan setiap harinya pada penatausahaan aset. Selain itu, SIMDA BMD pun digunakan rata-rata sekitar 6-7 jam atau sejumlah jam kerja. Bahkan, penggunaannya bisa lebih apabila sedang dilaksanakan pelaporan setiap semester per tahunnya.

Aspek kedua dalam menggambarkan maksud penggunaan adalah kesesuaian penggunaan dengan tujuan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri, SIMDA BMD telah digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, meskipun belum terlalu mengakomodir kebutuhan pengguna. Kemudian, SIMDA BMD digunakan oleh pengelola barang untuk memeriksa data pada laporan yang dikirim oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkaitan dengan penatausahaan aset. Selain itu, SIMDA BMD juga digunakan untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana tujuan dari SIMDA BMD tersebut dikembangkan.

Aspek terakhir dalam menggambarkan maksud penggunaan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) adalah kegunaan dari sistem atau fitur-fitur yang disediakan oleh SIMDA BMD. Pengguna SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri sudah menggunakan fitur-fitur yang disediakan SIMDA BMD dengan baik. Hal tersebut dikarenakan fitur-fitur yang disediakan sudah cukup mengakomodir kebutuhan dari pengguna SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Kepuasan Pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dimensi selanjutnya dalam menggambarkan efektivitas dari sistem informasi adalah kepuasan dari pengguna sistem informasi tersebut. Kepuasan pengguna dalam sistem informasi dapat dilihat melalui pengalaman penggunaan sistem informasi oleh pengguna. Berdasarkan pengalaman pengguna dari sistem informasi tersebut maka akan terlihat apakah pengguna puas terhadap sistem informasi yang digunakan serta apakah ekspektasi pengguna terhadap sistem informasi sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, ekspektasi awal para pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) terhadap SIMDA BMD adalah ekspektasi yang baik, di mana SIMDA BMD sebagai sistem informasi yang membantu pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki keandalan dan mumpuni dalam pengelolaan BMD. Namun, berdasarkan

penturan mayoritas informan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Ekspektasi atau anggapan awal bahwa SIMDA BMD memudahkan pengelolaan BMD namun pada kenyataannya cukup menyulitkan. Hal tersebut merupakan jawaban mayoritas dari informan penelitian ini.

Ketidaksesuaian ekspektasi pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) memengaruhi pada tingkat kepuasan keseluruhan sistem informasi pengguna. Seluruh pengguna berpendapat bahwa mereka tidak terlalu merasa puas dengan SIMDA BMD secara keseluruhan dikarenakan kekurangan-kekurangan dari sistemnya sendiri yang membuat pekerjaan pengguna agak terganggu. Rata-rata permasalahan yang terjadi pada SIMDA BMD adalah kecepatan pelaporan. Biasanya kecepatan pelaporan ini dipengaruhi oleh banyaknya data yang di-input.

Manfaat Bersih dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dimensi terakhir dalam menggambarkan efektivitas dari sebuah sistem informasi adalah manfaat bersih yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut. Dalam menggambarkan manfaat yang dihasilkan dari SIMDA BMD dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) indikator, di antaranya Produktivitas Pengguna; Peningkatan Outcome; dan Kinerja Pekerjaan Pengguna.

Aspek pertama dalam menggambarkan manfaat bersih adalah produktivitas pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah mampu meningkatkan produktivitas pekerjaan dari pengguna. Hal didasari atas fitur-fitur serta menu-menu yang ditawarkan oleh SIMDA BMD telah membantu pekerjaan dari pengguna menjadi lebih mudah. Selain itu, hadirnya SIMDA BMD juga dapat membantu pekerjaan pengguna menjadi semi-otomatis, sebagai contoh dalam melakukan perhitungan penyusutan dan pelaporan yang

tidak perlu membuat format dari awal namun sudah otomatis dihasilkan oleh SIMDA BMD.

Aspek selanjutnya dalam menggambarkan manfaat bersih dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) adalah peningkatan *outcome*. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum mampu berkontribusi besar bagi pencapaian opini tertinggi untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa SIMDA BMD belum mampu mencapai *outcome* yang diharapkan. SIMDA BMD bukan faktor yang menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung mendapatkan pencapaian opini tertinggi dari badan pemeriksa.

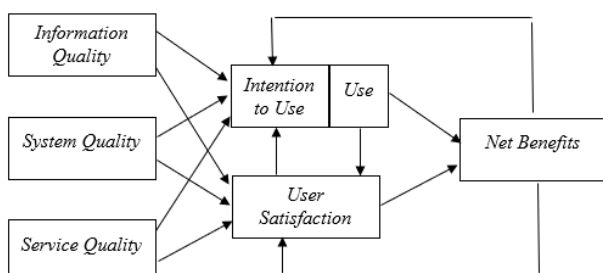
Aspek terakhir dalam menggambarkan manfaat bersih adalah kinerja pekerjaan dari pengguna. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dapat meningkatkan kinerja pekerjaan dari pengguna. Pernyataan dapat dilihat dari berdasarkan bagaimana SIMDA BMD membantu dalam pembuatan keputusan pengguna menjadi lebih baik dan perannya dalam menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Analisis Model Efektivitas Sistem Informasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dalam menggambarkan efektivitas dari sebuah sistem informasi, diperlukan untuk menganalisisnya berdasarkan model dalam menilai efektivitas sistem informasi.

Bagan 1. Model Efektivitas Sistem Informasi DeLone & McLean

Sumber: (DeLone & McLean, 2003)



DeLone dan McLean menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang digunakan dalam menggambarkan efektivitas sebuah sistem informasi memiliki hubungan-hubungan yang saling memengaruhi.

Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Pelayanan terhadap Maksud Penggunaan dan Kepuasan Pengguna

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa dimensi kualitas informasi dan kualitas sistem ternyata tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap dimensi maksud penggunaan yang terdapat dalam teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003). Hal ini didasari pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh aspek yang menggambarkan dimensi maksud penggunaan terpenuhi, di mana Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah digunakan sesuai dengan tujuan dikembangkannya. Selain itu, SIMDA BMD juga digunakan oleh pengguna setiap hari dalam menunjang pekerjaannya serta fitur-fitur yang ditawarkan oleh SIMDA BMD juga telah dimanfaatkan dengan baik. Padahal, hasil penelitian pada dimensi kualitas informasi dan kualitas sistem menunjukkan hasil yang tidak baik. Apabila merujuk pada teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003) di mana kualitas sistem dan kualitas informasi akan memiliki hubungan sebab akibat terhadap dimensi maksud penggunaan. Tetapi, hasil penelitian berkata lain yang artinya kualitas sistem dari SIMDA BMD dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA BMD tidak berakibat pada kesesuaian maksud penggunaan SIMDA BMD oleh pengguna.

Berbeda dengan kualitas sistem dan kualitas informasi, dimensi kualitas pelayanan organisasi pengembang sistem informasi memiliki hubungan sebab akibat dengan dimensi maksud penggunaan sesuai dengan teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003). Berdasarkan hasil analisis penulis, pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang cukup baik mampu meyakinkan pengguna untuk tetap menggunakan SIMDA BMD dalam menunjang pekerjaan sehari-hari. Dengan menyingkirkan fakta bahwa penggunaan SIMDA BMD adalah wajib, pengguna merasa dapat mengandalkan pihak BPKP apabila SIMDA BMD terdapat permasalahan, karena pihak BPKP mampu diajak bekerja sama dengan baik dalam penyelesaian permasalahan yang terdapat pada SIMDA BMD.

Berbeda dengan hubungannya terhadap dimensi maksud penggunaan, dimensi kualitas sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dan kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA BMD memiliki hubungan sebab akibat terhadap dimensi kepuasan pengguna SIMDA BMD. Artinya, hasil penelitian sesuai dengan teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003) dimana kualitas sistem dan kualitas informasi memiliki hubungan sebab akibat terhadap kepuasan pengguna. Hal ini didasari pada hasil penelitian dimana kualitas sistem dan kualitas informasi dari SIMDA BMD menunjukkan hasil yang tidak baik. Sama halnya dengan dimensi kepuasan pengguna, dimana pengguna dari SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak merasa puas dengan SIMDA BMD. Hal ini dikarenakan ekspektasi yang diharapkan pengguna terhadap SIMDA BMD tidak sesuai dengan kenyataan ketika menggunakan SIMDA BMD untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, mayoritas dari informan menyatakan perasaan kurang puas terhadap keseluruhan sistem dari SIMDA BMD. Tetapi, kualitas pelayanan dari pengembang Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang sudah baik tidak berakibat pada kepuasan pengguna dari SIMDA BMD menjadi baik. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dimana meskipun kualitas pelayanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah baik, namun pengguna dari SIMDA BMD tetap tidak puas terhadap SIMDA BMD.

Pengaruh Maksud Penggunaan terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepuasan Pengguna terhadap Maksud Penggunaan

Seperti yang telah digambarkan di atas bahwa DeLone dan McLean (2003) mengatakan ada hubungan sebab akibat dari kepuasan pengguna terhadap maksud penggunaan pengguna maupun sebaliknya, yaitu maksud penggunaan terhadap kepuasan pengguna. Namun, hasil analisis penulis menggambarkan hal yang berbeda, dimana tidak ada hubungan sebab akibat antara kepuasan pengguna terhadap maksud penggunaan. Meskipun pengguna dari SIMDA BMD merasa tidak puas dengan SIMDA BMD itu sendiri, tetapi karena sifat penggunaan

SIMDA BMD wajib maka pengguna tetap menggunakan SIMDA BMD dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari dan memanfaatkan seluruh fitur dan menu yang ada di dalamnya. Padahal, berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna dari SIMDA BMD, pengguna dari SIMDA BMD tidak merasa puas dengan SIMDA BMD yang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti ketidaksesuaian ekspektasi dengan kenyataan dan perasaan tidak puas terhadap keseluruhan sistem. Namun, dengan sifat SIMDA BMD yang wajib digunakan maka tidak ada pilihan lain bagi pengguna selain tetap menggunakan SIMDA BMD sebagai mana dengan mestinya.

Sama halnya dengan tidak adanya pengaruh kepuasan pengguna terhadap maksud penggunaan, dimensi maksud penggunaan terhadap kepuasan pengguna pun tidak menunjukkan adanya pengaruh. Maksud penggunaan dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) digambarkan dengan melihat dari sifat penggunaan, kesesuaian penggunaan, dan kegunaan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMDA BMD digunakan setiap hari penggunaannya dalam melakukan penatausahaan aset. Selain itu, pengguna juga menggunakan SIMDA BMD sebagai mana mestinya, dimana SIMDA BMD digunakan untuk melakukan penatausahaan aset seperti input rincian barang dan melakukan pelaporan. Fitur-fitur yang terdapat pada SIMDA BMD pun telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengguna dan mampu mengakomodir kebutuhan pengguna dari SIMDA BMD. Namun, hal-hal yang disebutkan tersebut ternyata tidak membuat pengguna dari SIMDA BMD merasa puas. Pengguna dari SIMDA BMD merasa masih banyak pembaharuan-pembaharuan yang harus dilakukan oleh pengembang dari SIMDA BMD agar SIMDA BMD dapat diandalkan sepenuhnya dan bermanfaat sepenuhnya bagi pengelolaan aset terutama penatausahaan aset di Pemerintah Daerah Kota Bandung, seperti kecepatan pelaporan dan sebagainya.

Pengaruh Maksud Penggunaan dan Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih

Dalam teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003), dimensi dari maksud penggunaan dan kepuasan pengguna dari sebuah sistem informasi memiliki

pengaruh terhadap dimensi manfaat bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi maksud penggunaan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) memiliki hubungan sebab akibat terhadap manfaat bersih yang dihasilkan oleh SIMDA BMD. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengguna yang telah merasa pekerjaannya dibantu oleh SIMDA BMD dan telah memanfaatkan seluruh fitur dan menu yang ada di dalamnya dengan baik ternyata produktivitas dan kinerja dari pekerjaannya pun meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA BMD mampu mengefisienkan waktu pekerjaan dan memudahkan pekerjaan dibandingkan dengan bekerja secara manual atau tanpa menggunakan SIMDA BMD. Hal ini karena SIMDA BMD mampu menghasilkan laporan dan perhitungan secara otomatis dibandingkan dengan mengerjakannya tanpa SIMDA BMD. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebab menggunakan SIMDA BMD pada pekerjaan sehari-hari serta memanfaatkan fitur dan menunya dengan baik berakibat pada produktivitas dan kinerja yang meningkat pula. Hal ini sesuai dengan teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003) dimana dimensi maksud penggunaan akan berpengaruh pada dimensi manfaat bersih.

Sama halnya dengan dimensi maksud penggunaan, kepuasan pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) juga memiliki hubungan sebab akibat terhadap manfaat bersih yang dihasilkan oleh SIMDA BMD. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketidakpuasan dari pengguna SIMDA BMD disebabkan oleh ketidaksesuaian ekspektasi awal terhadap SIMDA BMD dengan kenyataan ketika menggunakan SIMDA BMD dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan ketidakpuasan terhadap keseluruhan sistem dari SIMDA BMD. Hal tersebut berakibat pada tidak tercapainya peningkatan outcome dari SIMDA BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA BMD tidak memiliki peran dalam pencapaian tertinggi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjadi outcome dari SIMDA BMD ini. Berdasarkan hasil penelusuran, SIMDA BMD telah digunakan sejak awal diluncurkan pada tahun 2007 tetapi Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) pada tahun 2018 dan 2019. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mampu mengantarkan Pemerintah Daerah Kota Bandung mendapatkan opini tertinggi pada LKPD-nya adalah sumber daya manusia yang bekerja dalam pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi-evaluasi yang dilakukan terhadap pengelolaan aset dan keuangan, bukan dari penggunaan SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, pengguna yang tidak puas menjadikan tidak terjadinya peningkatan outcome dari SIMDA BMD. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan teori yang diajukan oleh DeLone dan McLean (2003) bahwa dimensi kepuasan pengguna memiliki pengaruh sebab akibat terhadap manfaat bersih.

Pengaruh Manfaat Bersih terhadap Maksud Penggunaan dan Kepuasan Pengguna

DeLone dan McLean (2003) dalam teorinya menyebutkan bahwa manfaat bersih dari sebuah sistem informasi akan berpengaruh terhadap maksud penggunaan dan kepuasan pengguna dari sistem informasi tersebut. Berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebab akibat antara manfaat bersih dari SIMDA BMD terhadap maksud pengguna dari kepuasan pengguna dari SIMDA BMD. Hal ini dibuktikan dengan sebab SIMDA BMD mampu memberikan produktivitas dan kinerja yang baik pengguna, pengguna pun menggunakan SIMDA BMD sesuai dengan tujuannya dan memanfaatkan fitur dan menu yang ada. SIMDA BMD mampu memberikan efisiensi waktu pekerjaan yang baik dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan dibandingkan melakukan pekerjaan tanpa menggunakan SIMDA BMD. Oleh karena itu, pengguna merasa pekerjaannya terbantunya oleh SIMDA BMD, sehingga fitur-fitur dan menu-menu yang terdapat pada SIMDA BMD dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna.

Sama halnya dengan dimensi maksud penggunaan, manfaat bersih dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) juga memiliki pengaruh sebab akibat terhadap kepuasan pengguna dari SIMDA BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMDA BMD belum mencapai peningkatan outcome yang telah menjadi salah satu tujuan dari

dikembangkannya SIMDA BMD. Hal tersebut dibuktikan dengan baru tercapainya opini tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2018. Sedangkan, SIMDA BMD telah digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung sejak tahun 2007. Tidak tercapainya peningkatan outcome dari SIMDA BMD ini mengakibatkan pada kepuasan pengguna dari SIMDA BMD yang tidak baik. Pengguna menjadi merasa penggunaan SIMDA BMD ini tidak seperti apa yang diharapkan pada saat awal menggunakannya, yaitu tercapainya opini tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, kekurangan-kekurangan dari sistem SIMDA BMD sendiri juga menjadikan sulitnya peningkatan pencapaian outcome dari LKPD Kota Bandung.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap efektivitas dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) didapat bahwa dimensi pertama dari efektivitas SIMDA BMD, yaitu kualitas informasi belum menunjukkan kualitas yang baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa aspek yang masih belum sempurna, seperti akurasi yang tidak baik, format output yang menyulitkan pengguna, proses informasi yang lama, serta database yang sulit dimuat.

Ketidaksempurnaan kualitas informasi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah gangguan dari pendukung sistem informasi seperti jaringan yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang mumpuni. Jaringan yang dimaksud dalam hal ini adalah jaringan internet yang digunakan untuk mengoperasikan SIMDA BMD. Berdasarkan hasil penelitian, pengguna dari SIMDA BMD cukup sering mengalami masalah jaringan yang kurang baik sehingga menghambat operasional dari SIMDA BMD dalam menghasilkan informasi untuk pengguna. Selain itu, perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIMDA

BMD juga masih kurang mumpuni. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pengguna dari SIMDA BMD bahwa seringkali SIMDA BMD mengalami not responding dan berjalan dengan lambat ataupun gagal dalam menghasilkan informasi yang dihasilkan. Terlebih, perangkat keras yang digunakan oleh pengguna SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak merata, ada yang menggunakan perangkat keras terbaru yang mampu mendukung operasional SIMDA BMD yang lancar dan ada yang menggunakan perangkat keras yang kurang mendukung operasional SIMDA BMD sehingga sering terjadi permasalahan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Sistem

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kualitas sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) juga memiliki kualitas yang tidak baik. Menurut hasil penelitian bahwa pengguna merasa SIMDA BMD tidak terlalu mudah digunakan. Selain itu, perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan SIMDA BMD pun belum dapat diandalkan serta pengoperasian sistem yang membutuhkan usaha lebih juga menandai kualitas sistem yang tidak baik.

Hal-hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), diantaranya adalah adanya sistem informasi lain yang dianggap pengguna memiliki kualitas yang lebih baik dan lambatnya proses pembaharuan dari sistem informasi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 2 (dua) informan pernah menggunakan sistem informasi lain yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama tetapi dikelola oleh pihak swasta. Berdasarkan penturan kedua informan tersebut, mereka merasa kualitas sistem informasi yang dikelola oleh pihak swasta tersebut lebih baik karena memiliki fitur-fitur dan menu yang lebih lengkap dan lebih sesuai dengan kebutuhan dari pengguna dibandingkan dengan SIMDA BMD. Selain sistem informasi lain yang dianggap lebih baik, ternyata SIMDA BMD pun lambat dalam merespon perubahan yang terjadi mengenai pengelolaan aset. Hal ini didasari pada pembaharuan SIMDA BMD yang selalu terlambat bertahun-tahun ketika melakukan

penyesuaian dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penatausahaan di dalamnya.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan

Berbeda dengan kualitas sistem dan kualitas informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dari pengembang Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah memiliki kualitas pelayanan yang cukup baik. BPKP dianggap telah memiliki respon yang baik serta menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan SIMDA BMD. Selain itu, pihak dari BPKP pun mampu bekerja sama dengan baik dengan pengguna dari SIMDA BMD di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Meskipun secara umum kualitas pelayanan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah baik, namun berdasarkan hasil penelitian kemampuan yang dimiliki oleh BPKP selaku pengembang dari SIMDA BMD masih belum terlalu dapat diandalkan. Faktor yang menyebabkan kualitas dari pengembang SIMDA BMD baik meskipun kemampuan yang dimiliki kurang adalah karena ketika terjadi permasalahan dengan SIMDA BMD maka satu-satunya pihak yang bisa diandalkan untuk membantu penyelesaiannya adalah pengembang dari SIMDA BMD itu sendiri, yaitu BPKP. Hal ini pun yang menyebabkan mengapa model hubungan antara dimensi kualitas pelayanan dengan kepuasan pengguna dari DeLone dan McLean (2003) tidak terbukti pada SIMDA BMD, dimana ketika kualitas pelayanan dari pengembang SIMDA BMD telah baik, namun pengguna masih merasa belum puas dengan SIMDA BMD itu sendiri. Oleh karena itu, seluruh pengguna dari SIMDA BMD termasuk Pemerintah Daerah Kota Bandung harus mengandalkan BPKP serta BPKP selaku pengembang dari SIMDA BMD perlu memberikan pelayanan yang baik terhadap penggunanya.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Maksud Penggunaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, serta SIMDA BMD telah digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengguna dari SIMDA BMD juga menggunakan sistem tersebut setiap hari dalam menunjang pekerjaannya. Hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa maksud penggunaan dari SIMDA BMD telah baik karena telah sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk menunjang pekerjaan.

Namun, hasil analisis penulis mendapati bahwa maksud penggunaan SIMDA BMD yang telah sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya yang telah menunjang pekerjaan tidak diakibatkan oleh kualitas informasi dan kualitas sistem dari SIMDA BMD. Faktor-faktor yang memengaruhi mengapa maksud penggunaan SIMDA BMD telah sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya yang telah menunjang pekerjaan adalah sifat penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang wajib. Penggunaan SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah wajib untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penatausahaan. Oleh karena itu, apabila kualitas sistem dari SIMDA BMD dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA BMD buruk pun, pengguna tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan SIMDA BMD untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pengguna

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum merasa puas dengan SIMDA BMD itu sendiri. Hal ini didasari pada beberapa hal, diantaranya adalah kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sistem, terutama dari segi kualitas informasi dan kualitas sistem dari SIMDA BMD. Adapun faktor yang menyebabkan mengapa pengguna tidak merasa puas dengan SIMDA BMD adalah adanya celah antara ekspektasi dengan kenyataan. Apabila merujuk dari hasil wawancara dengan pengguna dari SIMDA BMD, mayoritas informan mengatakan bahwa mereka memiliki ekspektasi yang cukup baik

terhadap SIMDA BMD, dimana harapannya SIMDA BMD dapat mudah digunakan dan mengakomodir kebutuhan pengelolaan aset, termasuk penatausahaan aset. Namun, pada kenyataannya beberapa informan mengeluhkan adanya kekurangan-kekurangan yang menjadikan mereka tidak puas terhadap SIMDA BMD seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, faktor yang memengaruhi kualitas sistem juga menjadi faktor pengaruh bagi kepuasan pengguna. Beberapa pengguna telah menggunakan sistem informasi manajemen lain yang dianggap lebih baik. Sistem informasi manajemen lain itu sudah menjadi standar baru bagi pengguna dalam menggunakan sistem informasi manajemen lain. Sehingga, ketika pengguna disuguhkan dengan SIMDA BMD yang pengguna anggap kualitasnya berada di bawah sistem informasi manajemen yang telah mereka pakai, maka hasilnya pengguna akan tidak puas terhadap SIMDA BMD. Perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaan SIMDA BMD yang didasari atas kebutuhan dari penggunaannya agar kepuasan pengguna dalam menggunakannya semakin meningkat.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manfaat Bersih

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) telah memberikan peningkatan produktivitas kerja dari pengguna serta peningkatan kinerja dari pengguna SIMDA BMD itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari bagaimana SIMDA BMD mampu menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan. Selain itu, fitur serta menu yang terdapat dalam SIMDA BMD telah membantu pekerjaan pengguna menjadi lebih mudah dan cepat.

Namun, dalam melihat manfaat bersih dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) tidak dapat dilihat dari produktivitas dan kinerja pengguna saja namun juga melihat pada peningkatan serta pencapaian outcome dari SIMDA BMD itu sendiri. Saat ini, SIMDA BMD belum mampu mencapai outcome-nya. Meskipun saat ini Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mendapatkan opini tertinggi dari badan pemeriksa untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya, tetapi

tercapainya opini tertinggi tersebut bukan dikarenakan oleh SIMDA BMD itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung mendapatkan opini tertinggi pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sumber daya manusia yang telah melaksanakan pengelolaan aset dengan baik, termasuk dalam hal penatausahaan aset seperti penginputan data yang lengkap, laporan-laporan yang sesuai, dan sebagainya. Sedangkan, SIMDA BMD hanya alat yang digunakan untuk membuat laporan-laporan serta melakukan beberapa penatausahaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, SIMDA BMD dapat dikatakan belum mampu mencapai outcome-nya karena ketercapaian opini tertinggi LKPD Kota Bandung terletak pada faktor sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan pengelolaan aset, termasuk penatausahaan.

KESIMPULAN

Dalam menyimpulkan penelitian mengenai efektivitas dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung penulis mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan. Penulis menarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif terhadap penatausahaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal tersebut dinilai berdasarkan dimensi-dimensi yang penulis gunakan dalam menggambarkan efektivitas dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 (enam) dimensi yang menggambarkan efektivitas dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) tidak terpenuhi seluruhnya. Dimensi kualitas informasi dan kualitas sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum mampu menunjukkan kualitas yang baik serta dimensi kepuasan pengguna yang belum menunjukkan hasil yang baik pula. Dalam dimensi manfaat bersih pun Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum mampu meningkatkan pencapaian

outcome berupa opini tertinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun tidak tercapainya seluruh dimensi dari efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) adalah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Permasalahan jaringan yang sering terganggu. Hal ini didasarkan pada penuturan pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dimana seringkali sistem informasi tersebut terganggu penggunaannya karena jaringan yang tidak stabil atau tidak berjalan. Akibatnya, pekerjaan dari para pengguna terganggu serta laporan-laporan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) tidak mampu didapatkan.

2. Perangkat keras yang kurang mumpuni. Meskipun Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) tidak memiliki requirements tertentu pada perangkat keras untuk dapat menjalankannya, namun sering ditemukan adanya kendala-kendala yang diakibatkan oleh perangkat keras yang digunakan. Hasil penuturan pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) mengatakan seringkali sistem terjadi not responding atau tidak mau berjalan akibat kerja dari perangkat keras yang terlalu berat. Selain itu, spesifikasi perangkat keras yang dimiliki oleh para pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak merata. Terdapat beberapa pengguna yang menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi minim dan ada pengguna yang sudah menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi yang cukup.

3. Adanya sistem informasi lain yang lebih baik. Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri pernah menggunakan sistem informasi lain dalam melaksanakan pengelolaan aset termasuk

penatausahaan aset. Penggunaan sistem informasi yang dikembangkan oleh pihak swasta ini digunakan selama satu tahun. Para pengguna yang pernah menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh pihak swasta ini merasakan perbedaan yang cukup signifikan dari segi kualitas apabila dibandingkan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Faktor ini yang kemudian menjadi pengaruh terhadap kualitas sistem dan kepuasan pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

4. Kewajiban menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam melakukan pengelolaan aset termasuk penatausahaan aset. Hal ini menjadikan pengguna tidak memiliki opsi lain selain memanfaatkan fitur-fitur dan menu yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk melaksanakan pengelolaan aset termasuk penatausahaan aset di dalamnya. Faktor ini berpengaruh pada dimensi maksud penggunaan.

5. Adanya celah antara ekspektasi dan kenyataan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Mayoritas ekspektasi pengguna dari SIMDA BMD ketika pertama kali menggunakannya adalah baik, dimana mereka berharap SIMDA BMD memiliki kualitas keseluruhan sistem informasi yang baik. Namun, pada kenyataannya, banyak pengguna mengeluhkan adanya permasalahan-permasalahan yang mengganggu dalam penggunaan SIMDA BMD dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga, mereka merasa tidak puas dengan SIMDA BMD karena tidak sesuai dengan harapan.

6. Tidak adanya kontribusi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) terhadap pencapaian opini tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung. Meskipun saat ini Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mendapatkan opini tertinggi bagi LKPD-nya, tetapi hal tersebut bukan dikarenakan oleh penggunaan SIMDA BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Alasan pencapaian opini tertinggi pada LKPD Kota Bandung adalah sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan pengelolaan aset, salah satunya penatausahaan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Pembangunan. (2019). Modul Pelatihan SIMDA BMD Versi 2.0.7. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication (5th Editio). Los Angeles: SAGE Publication.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Hutahean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi* (Edisi Pertama). Yogyakarta: Deepublish.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Cetakan Pertama). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendalaman Kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sumaryana, A., Nurasa, H., & Sukarno, D. (2020). *Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, dan Metode Penelitian Panduan untuk Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir* (2nd ed.). Sumedang: Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

- Padjadjaran.
- Tomo. (2019). *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Jakarta: Indocamp.
- Ada, S., & Ghaffarzadeh, M. (2015). Decision Making Based On Management Information System and Decision Support System. *European Researcher*, 93(4), 260–269. <https://doi.org/10.13187/er.2015.93.260>
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Publik Profetik*, 04(2), 172–199.
- Alfian, M. (2015). Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 119. <https://doi.org/10.24914/jeb.v18i3.277>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2019). *Modul Pelatihan SIMDA BMD Versi 2.0.7*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>
- Berisha - Shaqiri, A. (2014). Management Information System and Decision-Making. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(July 2014). <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n2.p19>
- Boell, S., & Cecez-Kecmanovic, D. (2012). Conceptualizing information systems: From “input-processing-output” devices to sociomaterial apparatuses. *ECIS 2012 - Proceedings of the 20th European Conference on Information Systems*, June.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). What is an Information System? *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2015-March(March), 4959–4968. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.587>
- Bozeman, B., & Bretschneider, S. (1986). Public Management Information Systems: Theory and Prescription. *Public Administration Review*, 46, 475–487. <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-807-9>
- Budiasih, S. W. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) di SMP Negeri Se-Kabupaten Bantul. *Jurnal Hanata Widya*, 11–17.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publication* (5th Editio). SAGE Publication.
- Danziger, J. N., & Andersen, K. V. (2002). The Impacts of Information Technology on Public Administration: An Analysis of Empirical Research from the “Golden Age” of Transformation. *International Journal of Public Administration*, 25(5), 591–627. <https://doi.org/10.1081/PAD-120003292>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95. <https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information Systems Success Measurement. *Foundations and Trends® in Information Systems*, 2(1), 1–116. <https://doi.org/10.1561/29000000005>
- Heeks, R. (1998). *Information Systems for Public Sector Management* (No. 5).
- Hutahean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi* (Edisi Pert). Deepublish.
- Laksono, H. (2017). Evaluasi Kesuksesan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Menggunakan Model Kombinasi DeLone McLean dan Technology Acceptance Model. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 175.

- Mahayuddin, & Fatimah, J. M. (2016). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam Mendukung Inventarisasi Aset Daerah di Kabupaten Majene. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1).
- Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/sinergi.vol6.is1.art5>
- Meiryani, Siagian, P., Puspokusumo, R. A. A. W., & Lusianah. (2020). Decision making and management information systems. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 320–325. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.52>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publication.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ketigapulu). PT Remaja Rosdakarya.
- Monica, S. G., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 304–316.
- Pambudi, A. (2005). Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Kependidikan*, XXXV(2), 1–27.
- Permatasari, A. D., & Hastuti. (2020). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Irwns*, 2, 26–27.
- Saa'dillah. (2016). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Pengelolaan BMD Di Pemerintah Kabupaten Landak. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 5(2), 81–110.
- Seddon, P. B. (1997). A Respecification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success. In *Information Systems Research* (Vol. 8, Issue 3, pp. 240–253). <https://doi.org/10.1287/isre.8.3.240>
- Seddon, P., & Kiew, M.-Y. (1996). A Partial Test and Development of Delone and Mclean's Model of IS Success. *Australasian Journal of Information Systems*, 4(1), 90–109. <https://doi.org/10.3127/ajis.v4i1.379>
- Subiyakto, A., & Ahlan, A. R. (2014). Implementation of Input-Process-Output Model for Measuring Information System Project Success. *TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering*, 12(7), 5603–5612. <https://doi.org/10.11591/telkomnika.v12i7.5699>
- Sundgren, B. O. (2005). What Is a Public Information System? *International Journal of Public Information Systems*, 1(1), 81–99.
- Supriyanto, S. (2015). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 70. <https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1890>
- Utami, A., & Sari, Y. P. (2017). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) Pada Dppkad Kabupaten Pemalang. *Monex*, 1.6(1), 224–229.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. (2019). *Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat*. Bandung. Retrieved from <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Retrieved November 24, 2020, from <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>